

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**TAHUN 2021**



**BP2MI**

**UPT BP2MI BANDUNG**



**UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
(UPT BP2MI) BANDUNG**

Jalan Soekarno – Hatta No. 587 Telp. 022-7333212/Fax. 022-7336965 Bandung 40287  
e-mail : [bp3tkibandung@bnp2tki.go.id](mailto:bp3tkibandung@bnp2tki.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Bandung dapat diselesaikan dengan menggunakan pedoman penyusunan LAKIP yang baru berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP ini dibuat guna memenuhi kewajiban setiap unit satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan selama satu tahun anggaran kepada atasan.

Isi dari laporan ini menguraikan seluruh aktivitas secara rinci dan sistematis dengan menggunakan metode LAKIP yang menggambarkan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Organisasi, Penjelasan yang memadai atas Pencapaian Kinerja dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan.

Mudah-mudahan Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UPT BP2MI Bandung Tahun 2021 ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama 1 tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, 17 Januari 2022

Kepala,



Wahyuni Rachmet, S.I.K.

(NIP. 71110259)



## DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	iv
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Aspek Strategis	3
D. Permasalahan ( <i>Issue Strategis</i> )	3
E. Maksud dan Tujuan	4
F. Ruang Lingkup	4
G. Struktur Organisasi dan Pegawai	4
H. Dasar Pelaksanaan	6
I. Sistematika Penyajian	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024	10
B. Program dan Kegiatan	15
C. Penetapan Kinerja Tahun 2021	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Pengelolaan Kinerja	20
B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2021	23
C. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021	24
D. Akuntabilitas Keuangan	29
E. Kendala	31
F. Tindak Lanjut	32
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	34
B. Saran	35

**DAFTAR TABEL**

	<b>HAL</b>
<b>Tabel 1.</b> ASN UPT BP2MI Bandung Tahun 2021 (Sesuai Penempatan)	6
<b>Tabel 2.</b> Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan UPT BP2MI Bandung	11
<b>Tabel 3.</b> Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024	12
<b>Tabel 4.</b> Target Kinerja UPT BP2MI Bandung	13
<b>Tabel 5.</b> Arah Kebijakan dan Strategi UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024	14
<b>Tabel 6.</b> Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Seksi Penyiapan	16
<b>Tabel 7.</b> Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Seksi Perlindungan	16
<b>Tabel 8.</b> Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Bagian Tata Usaha	17
<b>Tabel 9.</b> Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	18
<b>Tabel 10.</b> Penetapan Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2021	19
<b>Tabel 11.</b> Kategori Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2021	20
<b>Tabel 12.</b> Pengukuran Capaian Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2021 (Per Triwulan)	21
<b>Tabel 13.</b> Pengukuran Capaian Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2021	22
<b>Tabel 14.</b> Hasil Evaluasi Capaian Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2021	23
<b>Tabel 15.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesatu	24
<b>Tabel 16.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua	27
<b>Tabel 17.</b> Indikator IKPA	28
<b>Tabel 18.</b> Revisi Anggaran Tahun 2021	29
<b>Tabel 19.</b> Realisasi Keuangan UPT BP2MI Bandung Tahun 2021	30
<b>Tabel 20.</b> Realisasi Keuangan UPT BP2MI Bandung Per Jenis Belanja Tahun 2021	30
<b>Tabel 21.</b> Realisasi Keuangan UPT BP2MI Bandung berdasarkan Belanja Tahun 2021	31



## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1.** Struktur Organisasi UPT BP2MI Bandung

**HAL**

5

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPT BP2MI Bandung serta melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, semua pimpinan Instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Penetapan Kinerja mulai eselon II ke atas secara berjenjang, maka disusunlah LAKIP UPT BP2MI Bandung Tahun 2021.

Menyikapi kondisi masyarakat yang semakin kritis ini, UPT BP2MI Bandung ke depan menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat dan harus semakin cermat dalam menyusun perencanaan agar lebih fokus, dan dapat menjawab berbagai persoalan.

Berdasarkan Visi, Misi dan tujuan UPT BP2MI Bandung yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategi UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024, terdapat 12 sasaran yang akan dicapai yaitu:

- 1) Tersedianya Peta Potensi CPMI;
- 2) Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2PMI;
- 3) Meningkatnya pelayanan PMI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai;
- 4) Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan PMI Non Prosedural;
- 5) Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Pengaduan masalah PMI dilayani, diproses, dan diselesaikan;
- 7) Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak PMI sejak Pra, masa dan purna;
- 8) Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan;
- 9) Meningkatnya kemampuan PMI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro;

- 10) Fasilitasi Pelayanan Penanganan PMI Bermasalah;
- 11) Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan;
- 12) Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Fungsi.

Sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran yang hendak dicapai dalam pelayanan penempatan PMI, dinilai dari Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2021, yaitu:

- 1) Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional;
- 2) Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia;
- 3) Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah;
- 4) Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia;
- 5) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya;
- 6) Nilai Capaian Kinerja Anggaran;
- 7) Nilai IKPA;
- 8) Nilai Zona Integritas;

Adapun ringkasan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

**RINGKASAN CAPAIAN KINERJA  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	<b>32.000 orang</b>	4.722 orang	<b>14,76</b>
		Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	<b>18,03%</b>	75,11%	<b>416,58</b>
		Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	<b>50 orang</b>	94 orang	<b>188</b>
		Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	<b>105 orang</b>	210 orang	<b>200</b>
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	<b>140 orang</b>	140 orang	<b>100</b>

NO	SASARAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	95	88,99	93,67
		Nilai IKPA	84	97,79	116,42
		Nilai Zona Integritas	90	88,03	97,81

## **KENDALA**

### **1. Seksi Penyiapan Penempatan**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Penyiapan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan diberlakukannya sistem Finger Print pada Penerbitan E-KTKLN (tidak ada fisik berupa Kartu) masih banyak PMI/CPMI yang mempertanyakan bukti bahwa E-KTKLN telah selesai diproses.

### **2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat kesulitan dalam menangani kasus mencari alamat PMI / memberikan info ke Keluarga PMI tentang permasalahan PMI dikarenakan tidak ada anggaran.
- 2) Pemanggilan P3MI untuk mediasi sangat sulit dikarenakan P3MI apabila dipanggil jarang yang datang bahkan banyak P3MI yang tutup.
- 3) *Counter* Bandara di Husein Sastranegara sudah tidak ada sehingga mengakibatkan pendataan keberangkatan dan kepulangan PMI tidak maksimal.
- 4) Edukasi kewirausahaan harus melibatkan mantan PMI Korea yang agak sulit untuk mendapatkannya dan kebanyakan sudah memiliki usaha sendiri.

### **3. Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat banyak yang belum mengetahui terkait prosedur Penempatan Kerja ke Luar Negeri.

- 2) Masyarakat pencari kerja banyak yang belum mengetahui terkait adanya website jobsinfo ([jobsinfo.bnp2tki.go.id](http://jobsinfo.bnp2tki.go.id)) dan cara menggunakannya.

#### **4. Sub Bagian Tata Usaha**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Masuknya Laporan dari setiap Seksi dan Satuan Kerja daerah masih sering terlambat.

### **TINDAK LANJUT**

#### **1. Seksi Penyiapan dan Penempatan**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Penyiapan dan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Petugas memberikan penjelasan kembali mengenai kebijakan tentang perubahan KTKLN menjadi E-KTKLN.

#### **2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan Disnakertrans / P4TKI / LTSP walaupun info yang didapat agak terlambat.
- 2) Membuat surat ke Kedutaan walaupun jarang ada balasan.
- 3) Sudah menemui pihak-pihak yang berkepentingan dan juga untuk sementara Petugas Pendataan menunggu di depan pintu keluar.
- 4) Mencari informasi ke para mantan PMI Korea untuk mendapatkan data PMI Korea yang belum memiliki usaha sendiri.

#### **3. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman di beberapa lokasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- 2) Menjelaskan prosedur mendaftar melalui website [jobsinfo.bnp2tki.go.id](http://jobsinfo.bnp2tki.go.id) kepada pencari kerja.

#### 4. Sub Bagian Tata Usaha

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan setiap seksi-seksi untuk mengatasi permasalahan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan.

## BAB I - PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategik, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja.

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja UPT BP2MI Bandung pada tahun 2021. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan UPT BP2MI Bandung dan seluruh jajaran BP2MI dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

### B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05/KA/I/2014 tentang Tugas, Fungsi dan uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, UPT BP2MI Bandung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### 1. Tugas Pokok

UPT BP2MI Bandung diberikan tugas pokok yaitu *"Memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan*

*penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Instansi baik Pemerintah Pusat maupun Daerah di wilayah Propinsi Jawa Barat”.*

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, UPT BP2MI Bandung menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, Pengembangan Program dan Anggaran;
2. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Penyelenggaraan Pemasyarakatan Program Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. Pelayanan Penerbitan Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (EKTKLN);
5. Pengumpulan data, Pembinaan Layanan Informasi serta Pembinaan Sistem dan Jaringan Informasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
6. Pemberdayaan dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
7. Pelaksanaan Pemantauan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara Penempatan;
8. Pelaksanaan Pendaftaran dan Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia Penempatan oleh Pemerintah;
9. Monitoring Penyediaan dan Pelaksanaan Sertifikasi Calon Pekerja Migran Indonesia;
10. Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Promosi;
11. Pelaksanaan Fasilitas Penyelesaian Masalah Pekerja Migran Indonesia;
12. Fasilitas Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
13. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
14. Penyusunan kelompok jabatan pengantar kerja;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

### C. ASPEK STRATEGIS

Berkaitan dengan pencapaian target RPJM Tahun 2020-2024, ditetapkan pokok-pokok strategi UPT BP2MI Jawa Barat yang difokuskan pada :

1. Unit Pelayanan Publik yang sudah memenuhi standar pelayanan;
2. Pemanfaatan jobs info BP2MI dalam alur proses penempatan PMI;
3. Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2PMI;
4. Fasilitasi Pelayanan Pengaduan melalui Crisis Center;
5. Fasilitasi Pelayanan Perlindungan PMI melalui Mediasi dan Advokasi;
6. Pemberdayaan PMI Purna dan Keluarganya.

### D. PERMASALAHAN UTAMA (*ISSUE STRATEGIS*)

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius antara dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia antara lain:

1. Hasil Pemetaan Potensi CPMI yang dilakukan oleh UPT BP2MI Bandung masih merupakan data mentah dan belum spesifik mengarah pada Peta CPMI.
2. Belum adanya potret daerah yang dapat digunakan dalam pembuatan model penyuluhan/sosialisasi.
3. Perlunya Bimbingan Teknis Petugas Penyuluh dalam rangka Peningkatan SDM.
4. Pemanfaatan Jobs Info masih belum sempurna, karena Petugas Jobs Info tidak dapat mengetahui berapa orang Jawa Barat yang telah mengakses ke Jobs Info.
5. Koneksi Jaringan (internet) yang tidak stabil mempengaruhi akses ke SISKOTKLN.
6. Realisasi Penempatan berbeda dengan realisasi PAP, karena PMI Cuti dan Re-Entry tidak mengikuti PAP sedangkan itu menjadi angka realisasi penempatan.
7. Permasalahan kasus terhadap PMI yang habis kontrak namun masih dipertahankan oleh majikan sedangkan keluarga dan PMI tersebut ingin pulang. UPT BP2MI Bandung sudah berkirin surat ke Kementerian Luar Negeri namun surat tersebut tidak ditanggapi.
8. Edukasi Pemberdayaan Kewirausahaan tidak ada anggaran monitoring walaupun lewat telepon tetapi tidak maksimal.
9. Tidak adanya anggaran untuk Identifikasi peserta Edukasi Pemberdayaan Kewirausahaan sehingga peserta yang diinginkan sesuai PERKA Badan tidak bisa dipenuhi.
10. Perlunya Bimbingan Teknis Evaluator Akuntabilitas Kinerja.

## **E. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disebut LAKIP dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hasil-hasil yang telah dicapai dan sebagai bentuk pertanggung-jawaban program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun agar diketahui oleh pimpinan dan masyarakat serta sebagai dasar dalam menentukan langkah yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pemerintahan.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dan hasil-hasilnya dari pelaksanaan program dan kegiatan UPT BP2MI Bandung yang tertib, teratur dan efisien untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

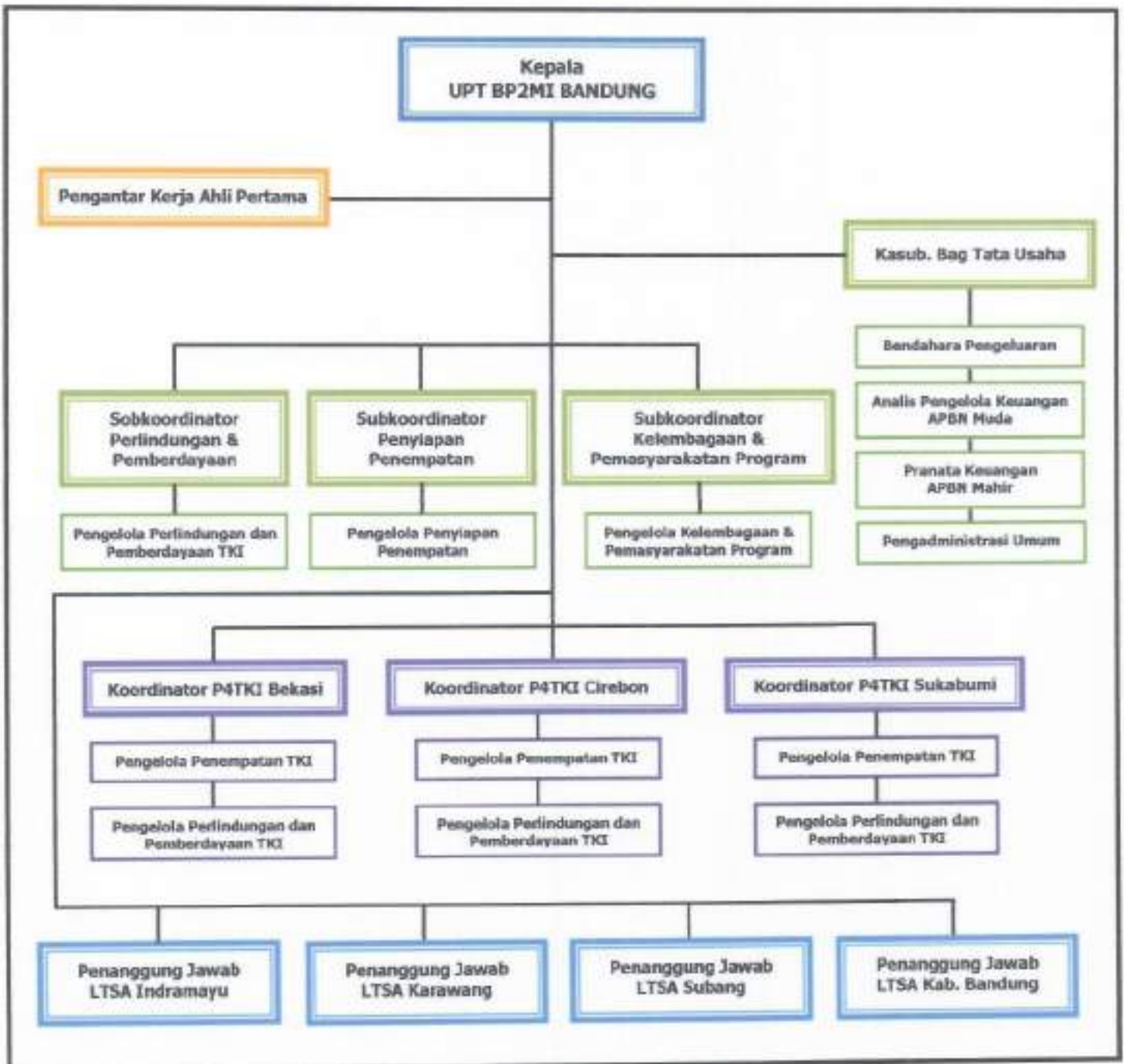
## **F. RUANG LINGKUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun oleh UPT BP2MI Bandung mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan khususnya tugas dan fungsi dalam lingkup pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Barat.

## **G. PERSONALIA DAN ORGANISASI**

### **1. Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut UPT BP2MI Bandung memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
UPT BP2MI BANDUNG**

Gambar 1  
STRUKTUR ORGANISASI UPT BP2MI BANDUNG

## 2. Jumlah Pegawai

UPT BP2MI Bandung pada tahun 2021 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 40 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1**  
**ASN UPT BP2MI Bandung Tahun 2021**  
**(Sesuai Penempatan)**

No	Seksi/Jabatan	Jenis Kelamin			Pangkat/ Gol				Jab	
		L	P	JML	I	II	III	IV	S	NS
1	Kepala UPT	1	-	1	-	-	-	1	1	-
2	Fungsional	6	3	9	-	-	9	-	3	6
3	Sub. Bagian Tata Usaha	3	-	3	1	-	2	-	1	2
4	Seksi Penyiapan Penempatan	2	3	5	1	-	4	-	-	5
5	Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan	2	3	5	-	-	5	-	-	5
6	Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program	2	2	4	-	-	3	1	-	4
7	P4TKI Bekasi	2	4	6	-	-	6	-	-	6
8	P4TKI Cirebon	-	2	2	-	-	2	-	-	2
9	P4TKI Sukabumi	1	-	1	-	-	1	-	-	1
10	LTSA Indramayu	-	2	2	-	-	2	-	-	2
11	LTSA Karawang	-	1	1	-	-	1	-	-	1
12	LTSA Subang	1	-	1	-	-	1	-	-	1
13	LTSA Kab. Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>35</b>

## H. DASAR PELAKSANAAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT BP2MI Bandung Tahun 2021 didasarkan pada Rencana Strategis UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu:

1. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar negeri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden R.I. Nomor 165 Tahun 2015 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara R.I. Tahun 2015 Nomor 339);
9. Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI;
12. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01/KA/-BNP2TKI/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10/KA/IV/2012 tanggal 20 April 2012;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05/KA/I/2014 tentang Tugas, Fungsi dan uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

15. Keputusan Kepala UPT BP2MI Bandung Nomor KEP.46/BP3TKI-6/VII/2020 tentang Rencana Strategis UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024;
16. Keputusan Kepala UPT BP2MI Bandung Nomor KEP.25/BP3TKI-6/I/2021 tentang Penetapan Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2021;
17. Keputusan Kepala UPT BP2MI Bandung Nomor KEP.26/BP3TKI-6/I/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama UPT BP2MI Bandung Tahun 2021.

## I. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT BP2MI Bandung Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

**Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi, aspek strategis, permasalahan utama (*issue* strategis), maksud dan tujuan, ruang lingkup, organisasi dan personalia, dasar pelaksanaan dan sistematika penyajian.

### **Bab II – Perencanaan Kinerja,**

- A. Menjelaskan Rencana Strategis UPT BP2MI Bandung yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja, Target Kinerja tahun 2021, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan;
- B. Menjelaskan Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021**, menjelaskan pengelolaan kinerja berupa

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;



4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05/KA/I/2014 tentang Tugas, Fungsi dan uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, UPT BP2MI Bandung berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis UPT BP2MI Bandung 2020 – 2024, Program dan Kegiatan dan Perjanjian Penetapan Kinerja UPT BP2MI Bandung tahun 2021.

### A. RENCANA STRATEGIS UPT BP2MI BANDUNG 2020 - 2024

Rencana Strategis (Renstra) UPT BP2MI Bandung 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah UPT BP2MI Bandung yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh UPT BP2MI Bandung beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra UPT BP2MI Bandung telah mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Perekonomian. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara unit-unit di bawah UPT BP2MI Bandung maupun *stakeholder* eksternal. Laporan Kinerja ini mengacu Renstra Tahun 2020-2014 tetapi beberapa Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama masih mengacu kepada Renstra Tahun 2015-2019. Secara ringkas substansi UPT BP2MI Bandung dapat diilustrasikan sebagai berikut :

#### 1. Visi

Visi UPT BP2MI Bandung yang diharapkan memberi arah ke masa depan yaitu :

Terwujudnya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di Provinsi Jawa Barat.

## 2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi tersebut, UPT BP2MI Bandung menetapkan 4 (empat) misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana UPT BP2MI Bandung.

## 3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, UPT BP2MI Bandung menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2024 yaitu:

**Tabel 2**  
Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan UPT BP2MI Bandung

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN
Terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya
	Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum
Terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
	Nilai AKIP UPT BP2MI

#### 4. Sasaran Program/Kegiatan

Berdasarkan atas tujuan tersebut, selanjutnya UPT BP2MI Bandung akan menjabarkan dalam sasaran-sasaran program/kegiatan (Sasaran Strategis) yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran Program/Kegiatan dan indicator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2020 – 2024. Menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB, dan APIP BP2MI atas SAKIP BP2MI perlu dilakukan penyeragaman Indikator Kinerja Utama (IKU) UPT BP2MI. Saat ini IKU UPT BP2MI masih menggunakan IKU BP3TKI, sehingga IKU UPT BP2MI belum selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) BP2MI. Adapun IKU UPT BP2MI yang disesuaikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**UPT BP2MI BANDUNG TAHUN 2020-2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah
	Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Puma dan keluarganya
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran
	Nilai IKPA
	Nilai Zona Integritas

## 5. Target Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Rencana Strategis UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024, target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Target Kinerja UPT BP2MI Bandung**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	32.000 orang
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	18,03%
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	50 orang
	Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	105 orang
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	140 orang
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	95
	Nilai IKPA	84
	Nilai Zona Integritas	90

## 6. Arah Kebijakan dan Strategi

Penyusunan Rencana Strategis sejauh mungkin telah diupayakan dapat mengakomodasikan kebutuhan *stakeholders*, baik internal BP2MI maupun instansi lain atau masyarakat umum sesuai dengan tugas dan fungsi yang di emban serta mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Arah kebijakan yang akan dilakukan UPT BP2MI Bandung dalam mendukung terciptanya *clean government dan good governance* sebagaimana matrik berikut ini :

Tabel 5  
Arah Kebijakan Dan Strategi UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia non prosedural	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan edukasi, propaganda, dan sosialisasi secara massif untuk memerangi <i>human trafficking</i></li><li>b. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia non prosedural</li><li>c. Monitoring di penampungan P3MI dan Lembaga Pendukung Penempatan serta di debarkasi dan embarkasi</li><li>d. Penguatan pengawasan P3MI, dengan cara memberikan peringatan serta rekomendasi skorsing dan pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)</li><li>e. Simplifikasi proses pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mudah, cepat dan transparan</li><li>f. Meminimalisir kasus Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen</li><li>g. Meningkatkan koordinasi dan peran daerah hingga ke desa dalam melakukan upaya bersama meminimalisir kasus Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen</li><li>h. Meningkatkan dan menambah jumlah paralegal yang ada di daerah hingga ke desa</li></ul>
Menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai <i>Very Very Important Person (VVIP)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memaksimalkan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya</li><li>b. Penguatan <i>help desk &amp; lounge</i> di bandara dan pelabuhan laut melalui kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait</li><li>c. Pengawasan jaminan <i>social Cost Structure</i></li></ul>
Peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatkan kompetensi/kapasitas Pekerja Migran Indonesia</li><li>b. Pemetaan <i>demand</i> pasar kerja dan <i>supply</i> yang ditindaklanjuti dengan harmonisasi</li><li>c. Sosialisasi dan diseminasi informasi peluang kerja terampil dan profesional di luar negeri</li><li>d. Penguatan skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>G to G, G to P, P to P, UKPS, dan Mandiri</i> termasuk <i>SP2T, SSW dan SPSK</i>)</li></ul>

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penurunan jumlah Pekerja Migran Indonesia <i>low skilled</i> beresiko tinggi	<ol style="list-style-type: none"><li>Mengarahkan penempatan Pekerja Migran Indonesia <i>low skilled</i> ke negara tujuan penempatan yang memiliki hukum ketenagakerjaan</li><li>Meningkatkan kampanye penyadaran public untuk pilihan bekerja di luar negeri</li><li>Memonitor penetapan standar minimum yang layak, upah dan kondisi kerja Pekerja Migran Indonesia di luar negeri</li><li>Menyederhanakan alur proses penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri</li></ol>
Peningkatan Puma Pekerja Migran Indonesia produktif dan reintegrasi social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	<ol style="list-style-type: none"><li>Peningkatan kapasitas usaha PMI dan keluarga melalui kegiatan edukasi yang dibutuhkan oleh PMI Puma dan keluarga yang sudah dilatih</li><li>Kegiatan pemberdayaan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui edukasi keuangan, kewirausahaan, dan kegiatan produktif</li><li>Memperkuat kapasitas masing-masing CO dari Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) yang sudah di bentuk dan memperluas program Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM)</li></ol>
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan kelembagaan, serta Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah sebagai kepanjangan tangan BP2MI untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia</li><li>Penguatan kelembagaan (program dan anggaran)</li><li>Penguatan kapasitas dan infrastruktur SDM</li><li>Pengembangan sarana dan prasarana</li><li>Peningkatan citra BP2MI (<i>image building/branding</i>)</li><li>Pengembangan sistem informasi</li><li>Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi</li><li>Peningkatan kualitas pelayanan publik</li><li>Penyelarasan regulasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia</li><li>Peningkatan pengendalian dan pembinaan akuntabilitas BP2MI</li></ol>

## B. PROGRAM DAN KEGIATAN

UPT BP2MI Bandung melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan BNP2TKI secara keseluruhannya itu Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT BP2MI Bandung adalah sebagai berikut:

**a. Seksi Penyiapan Penempatan**

Seksi Penyiapan Penempatan, bertanggungjawab pada Sasaran Program/kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 6**  
**Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja**  
**Seksi Penyiapan Penempatan Tahun 2021**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	32.000 orang
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN UPT BP2MI BANDUNG Rp. 2.258.555.000,-</b>		
<b>Program Penempatan dan Pelindungan PMI</b>		

**b. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan**

Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan, bertanggungjawab pada Sasaran Program/kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 7**  
**Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja**  
**Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan 18Tahun 2021**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	18,03%
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	50 orang
	Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	105 orang
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	140 orang
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN UPT BP2MI BANDUNG Rp. 542.736.000,-</b>		
<b>Program Penempatan dan Pelindungan PMI</b>		

### c. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha, bertanggungjawab pada Sasaran Program/ kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 8**  
**Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja**  
**Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2021**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	95
	Nilai IKPA	84
	Nilai Zona Integritas	90
JUMLAH PAGU ANGGARAN UPT BP2MI BANDUNG Rp. 10.476.565.000,-		
Program Dukungan Manajemen		

### C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE:/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan inerja Pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujudnya nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

UPT BP2MI Bandung telah membuat penetapan kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra UPT BP2MI Bandung tahun 2020 – 2024. Penetapan Kinerja tingkat UPT BP2MI Bandung Tahun 2021 dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

### 1. Rencana Kinerja Tahunan UPT BP2MI Bandung Renstra Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) UPT BP2MI Bandung tahun 2021 mengacu pada Renstra UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024 sebagaimana Keputusan Kepala UPT BP2MI Bandung Nomor.KEP.46/BP3TKI-6/VII/2020, sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**UPT BP2MI Bandung Tahun 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	32.000 orang
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	18,03%
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	50 orang
	Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	105 orang
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	140 orang
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	95
	Nilai IKPA	84
	Nilai Zona Integritas	90

### 2. Penetapan Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2021

Untuk melaksanakan Rencana Kinerja Tahunan UPT BP2MI Bandung Tahun 2021, telah dibuat Penetapan Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2021 sesuai Keputusan Kepala UPT BP2MI Bandung Nomor :KEP.25/BP3TKI-6/I/2021 tentang Penetapan Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2021. Adapun Penetapan Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 10  
Penetapan Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	32.000 orang
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	18,03%
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	50 orang
	Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	105 orang
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	140 orang
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	95
	Nilai IKPA	84
	Nilai Zona Integritas	90
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN UPT BP2MI BANDUNG Rp. 13.277.856.000,-</b>		
<b>Program Penempatan dan Pelindungan PMI dan Program Dukungan Manajemen</b>		

## BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGELOLAAN KINERJA

#### 1. Metode Pengukuran Kinerja

Perencanaan strategis dan pengukuran kinerja serta Analisis capaian kinerja merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam mewujudkan visi, misi, kebijakan, strategi, dan program UPT BP2MI Bandung.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada UPT BP2MI Bandung menggunakan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) yang dibuat berdasarkan rentang nilai kinerja sebagai berikut:

**Tabel 11**  
**Kategori Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2021**

No.	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1.	Sangat Baik	> 100	Biru
2.	Baik	80 – 100	Hijau
3.	Cukup	50 – 79	Kuning
4.	Kurang	< 49	Merah

Proses penghitungan kinerja menggunakan Informasi Indikator Kinerja (IIK) yang telah ditetapkan sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya.

#### 2. Pengukuran Capaian Kinerja

Penilaian kinerja pada UPT BP2MI Bandung dilakukan selama 1 tahun. Secara rinci hasil penilaian kinerja UPT BP2MI Bandung sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel 12  
Pengukuran Capaian Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2021  
(Per Triwulan)

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	
Kementerian/Lembaga	: BP2MI
Unit Kerja	: UPT BP2MI Bandung
Pagu Anggaran	: Rp. 13.277.856.000,-, Realisasi Anggaran: Rp. 12.961.160.261,- atau 97,61%
Program	: Program Penempatan dan Perlindungan PMI dan Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	32.000 orang	8.000 orang	1.310 orang	8.000 orang	1.424 orang	8.000 orang	648 orang	8.000 orang	1.340 orang
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	18,03%	4,51%	15,72%	4,51%	14,19%	4,51%	23,35%	4,51%	43,57%
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	50 orang	-	52 orang	-	5 orang	25 orang	9 orang	25 orang	28 orang
	Fasilitasi pemuliharaan Pekerja Migran Indonesia	105 orang	25 orang	62 orang	26 orang	23 orang	27 orang	35 orang	27 orang	70 orang
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purno dan keluarganya	140 orang	-	-	40 orang	40 orang	60 orang	60 orang	40 orang	40 orang
	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	95	95	-	95	-	95	72,01	95	86,99
	Nilai IKPA	84	84	-	84	-	84	76,63	84	97,79
Nilai Zona Integritas	90	90	-	90	-	90	88,03	90	99,03	

Tabel 13  
Pengukuran Capaian Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2021

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	
Kementerian/Lembaga	: BP2MI
Unit Kerja	: UPT BP2MI Bandung
Pagu Anggaran	: Rp. 13.277.856.000,-, Realisasi Anggaran: Rp. 12.961.160.261,- atau 97,61%
Program	: Program Penempatan dan Perlindungan PMI dan Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran (Dalam Rupiah)		
					Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	32.000 orang	4.722 orang	14,76	7.258.555.000	2.085.683.944	92,35
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	18,03%	75,11%	416,58			
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	50 orang	94 orang	188	72.030.000	61.418.130	85,27
	Facilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	105 orang	210 orang	200	95.686.000	76.623.012	80,08
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pembentayan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	140 orang	140 orang	100	435.720.000	425.623.685	97,68
	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	95	89,99	93,67	8.698.592.000	8.556.463.287	98,37
	Nilai IKPA	84	97,79	116,42			
	Nilai Zona Integritas	90	88,03	97,81	1.342.253.000	1.158.571.259	86,32

## B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam pelaksanaannya Evaluasi Capaian Kinerja pada UPT BP2MI Bandung menggunakan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) yang dibuat berdasarkan rentang nilai kinerja. Secara rinci hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran UPT BP2MI Bandung Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 14  
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	%
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	32.000 orang	4.722 orang	14,76
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	18,03%	75,11%	416,58
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	50 orang	94 orang	188
	Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	105 orang	210 orang	200
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	140 orang	140 orang	100
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	95	88,99	93,67
	Nilai IKPA	84	97,79	116,42
	Nilai Zona Integritas	90	88,03	97,81

### C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Untuk melakukan Analisis Capaian Kinerja pada UPT BP2MI Bandung dilakukan membandingkan target sasaran strategis dengan realisasinya akan didapat persentasi naik atau turun. Adapun Analisis Capaian Kinerjanya adalah sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesatu

##### Meningkatnya Pelindungan dan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya

Tabel 15  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesatu  
Tahun 2020 dan 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
1.	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	32.000 orang	731 orang	2,28	32.000 orang	4.722 orang	14,76
2.	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	30%	41,44%	138,13	18,03%	75,11%	416,58
3.	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	-	-	-	50 orang	94 orang	188
4.	Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	30 orang	22 orang	73,33	105 orang	210 orang	200
5.	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	350 orang	-	0	140 orang	140 orang	100

#### 1) Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional

Jumlah target fisik Penempatan PMI terampil dan profesional Tahun Anggaran 2021 UPT BP2MI Bandung adalah 32.000 orang. Sedangkan realisasi pada Tahun 2021 sebesar 4.722 orang atau 14,76%. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/1651/PK.02.02/VI/2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, terdapat 53 negara tujuan penempatan yang dibuka kembali bagi penempatan PMI, sehingga berpengaruh besar terhadap pencapaian target penempatan PMI terampil dan profesional.

Sehubungan dengan penyesuaian/reviu Rencana Strategis (Renstra) UPT BP2MI Bandung Tahun 2020 – 2024, bersama dengan itu terdapat beberapa perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama beserta jumlah targetnya. Dalam hal ini, untuk capaian Indikator Kinerja Utama yang melekat pada Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program tidak tercantum dalam Renstra, melainkan hanya mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Seksi Penyiapan Penempatan. Hal ini dikarenakan pada RKA-KL anggaran kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan melekat di anggaran kegiatan Seksi Penyiapan Penempatan.

Adapun capaian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan pada Tahun 2021 adalah kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman sebanyak 8 paket dengan jumlah peserta 1.200 orang, serta kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan PMI sebanyak 18 lokasi dengan jumlah peserta 2.700 orang.

## **2) Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia**

Dalam hal ini yang dimaksud kasusnya adalah pengaduan yang diterima langsung oleh UPT BP2MI Bandung. Menurunnya permasalahan CPMI/PMI terjadi dikarenakan UPT BP2MI Bandung selalu berupaya menindaklanjuti permasalahan CPMI/PMI dengan memanggil para pihak untuk di mediasi dalam rangka pemenuhan hak PMI. Jumlah pengaduan yang terdaftar di Crisis Center UPT BP2MI Bandung untuk Tahun 2021 berjumlah 1.161 kasus. Terdiri dari 1.122 kasus berupa surat masuk dan 39 kasus berupa pengaduan langsung (tatap muka). Semakin tertatanya proses penempatan dan perlindungan PMI sehingga permasalahan-permasalahan PMI di Luar Negeri menjadi berkurang. Kasus PMI terdapat penurunan sebesar 75,11%.

## **3) Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah**

Pekerja Migran Indonesia non prosedural yang berhasil dicegah merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru tercantum dalam Renstra UPT BP2MI Bandung yang sudah disesuaikan dengan Renstra BP2MI. Sehingga pada tahun 2020 target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Pekerja Migran Indonesia non prosedural yang berhasil dicegah masih belum ada angkanya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan PMI nonprosedural terindikasi sebagai korban TPPO adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedur penempatan PMI yang benar. Jumlah target Pekerja Migran Indonesia non prosedural yang berhasil dicegah Tahun Anggaran 2021 adalah 50 orang. Sedangkan realisasi pada Tahun 2021 kegiatan Pencegahan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan secara

nonprosedural di wilayah UPT BP2MI Bandung maupun yang dipulangkan ke daerah asal sebanyak 94 orang atau sebesar 188%.

#### **4) Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia**

UPT BP2MI Bandung memiliki Pos Pelayanan Pendataan Kepulangan dan Keberangkatan PMI di Debarkasi Embarkasi Bandara Husein Sastranegara Bandung yang selalu melakukan pendataan PMI yang keputingannya bermasalah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kedutaan/Perwakilan RI di negara-negara penempatan untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya. Jumlah target fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan realisasi kegiatan tahun 2020 melebihi target. Sehingga untuk target fasilitasi pemulangan PMI tahun 2021 menjadi 105 orang. Sedangkan realisasi pelayanan pemulangan PMI nonprosedural/terkendala dilakukan di Pos Pelayanan UPT BP2MI Bandung yang berada di Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Kertajati Majalengka untuk Tahun 2021 terdapat 210 orang (sebesar 200%) PMI terkendala yang difasilitasi biaya transportasi pemulangan ke daerah asal.

#### **5) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan Keluarganya**

Jumlah target Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan Keluarganya pada tahun 2021 menurun dibandingkan jumlah target tahun 2020 dari 350 orang menjadi 140 orang. Pada tahun 2020 kegiatan tersebut sama sekali tidak bisa dilaksanakan karena Pandemi Covid-19, sehingga realisasinya pun nihil. Untuk tahun 2021 kegiatan ini kembali dilaksanakan dengan adanya perubahan skema pelatihan kewirausahaan dan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dibatasi. Pada Tahun 2021 ini terdapat 7 Paket Pelatihan Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh UPT BP2MI Bandung, yang berlokasi di UPT BP2MI Bandung – Jawa Barat, BLK Komunitas Ponpes Salafi Al Fatonah Pasimalang Gunungguruh Sukabumi, Gor Jambenenggang Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi, Kantor Desa Sukajadi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka, Gedung MA Ar Rahman Kec Pusakajaya Kab. Subang dan Aula Desa Tegalurung Kec Cilamaya Kulon Kab. Karawang. Masing-masing paket pemberdayaan terdiri dari 20 orang peserta pelatihan, sehingga pada Tahun 2021, terdapat 140 orang yang dilakukan pelatihan kewirausahaan.

## 2. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kedua Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tabel 16  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua  
Tahun 2020 dan 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
1.	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	-	-	-	95	88,99	<b>93,67</b>
2.	Nilai IKPA	-	-	-	84	97,79	<b>116,42</b>
3.	Nilai Zone Integritas	-	-	-	90	88,03	<b>97,81</b>

### 1) Nilai Capaian Kinerja Anggaran

Nilai capaian kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran tingkat satuan kerja pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Perhitungan nilai capaian kinerja anggaran merupakan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-KL yang terdapat pada SMART Kementerian Keuangan. Indikator kinerja ini baru tercantum pada Reviu Renstra UPT BP2MI Bandung tahun 2021. Jumlah target nilai Capaian Kinerja Anggaran UPT BP2MI Bandung tahun anggaran 2021 adalah 95. Sedangkan realisasi nilai capaian kinerja anggaran pada Tahun 2021 sebesar 88,99 atau 93,67%.

### 2) Nilai IKPA

Sama halnya dengan nilai capaian kinerja anggaran, nilai IKPA juga merupakan indikator kinerja yang baru tercantum dalam Renstra UPT BP2MI Bandung tahun 2021. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) telah menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Jumlah target nilai IKPA UPT BP2MI Bandung tahun anggaran 2021 adalah 84. Sedangkan realisasi nilai IKPA Tahun 2021 adalah 97,79 atau 116,42%. Adapun nilai IKPA didapatkan dari 13 (tiga belas) indikator kinerja, berikut indikator dan nilai indikatornya :

Tabel 17  
Indikator IKPA

NO	INDIKATOR	NILAI INDIKATOR
1.	Penyerapan Anggaran	100
2.	Data Kontrak	100
3.	Penyelesaian Tagihan	100
4.	Capaian Output	95,58
5.	Pengelolaan UP dan TUP	100
6.	Revisi DIPA	100
7.	Deviasi Halaman III DIPA	83,04
8.	LPJ Bendahara	100
9.	Renkas	0
10.	Kesalahan SPM	90
11.	Retur SP2D	100
12.	Pagu Minus	100
13.	Dispensasi SPM	100

### 3) Nilai Zona Integritas

Pada tahun 2019 BP3TKI Bandung mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Instansi yang berpredikat wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Untuk tahun 2020 terdapat perubahan nomenklatur dari BP3TKI Bandung menjadi UPT BP2MI Bandung dan sedang proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM). Nilai Zona Integritas UPT BP2MI Bandung tahun ini sebesar **88,03**. Dengan nilai tersebut seharusnya bisa diajukan untuk penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBBM oleh Menpan RB, tetapi dikarenakan bukti dokumen ZI masih ada data-data yang belum di *update*, sehingga belum lolos seleksi penilaian. Selain itu perlu menambahkan dan melengkapi beberapa sarana prasarana yang menunjang pelayanan maksimal tetapi masih belum ada anggarannya. Sedangkan untuk pemenuhan Bukti Dokumen ZI masih terus di *update* datanya untuk di *upload* ke *Google Drive*.

#### D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT BP2MI Bandung ditunjang dengan anggaran yang berasal dari DIPA awal tahun 2021 sebesar Rp.15.408.658.000,- yang diterbitkan tanggal 23 November 2020, namun sampai bulan Desember terdapat beberapa kali Revisi Anggaran diantaranya sebagai berikut :

Tabel 18  
Revisi Anggaran Tahun 2021

Revisi	Tanggal	Anggaran		Keterangan
		Semula	Menjadi	
01	15 Februari 2021	Rp. 15.408.658.000,-	Rp. 15.168.170.000,-	Refocussing
02	19 April 2021	Rp. 15.168.170.000,-	Rp. 15.168.170.000,-	Revisi DIPA
03	04 Juni 2021	Rp. 15.168.170.000,-	Rp. 14.898.752.000,-	Penghematan Rev DJA
04	26 Juli 2021	Rp. 14.898.752.000,-	Rp. 14.096.103.000,-	Penghematan Rev DJA
05	06 Agustus 2021	Rp. 14.096.103.000,-	Rp. 13.495.493.000,-	Revisi DJA
06	30 September 2021	Rp. 13.495.493.000,-	Rp. 13.495.493.000,-	Revisi DIPA
07	02 November 2021	Rp. 13.495.493.000,-	Rp. 13.277.856.000,-	Refocussing
08	01 Desember 2021	Rp. 13.277.856.000,-	Rp. 13.277.856.000,-	Revisi POK
09	27 Desember 2021	Rp. 13.277.856.000,-	Rp. 13.277.856.000,-	Revisi POK

Adapun realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 12.965.922.239,- atau 97,65%. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan anggaran tahun 2020 sebesar 10.876.793.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.728.735.778,- (98,64%) maka terjadi penurunan sebesar 0,99%.

Secara keseluruhan kegiatan penyerapan anggaran pada UPT BP2MI Bandung tahun 2021 relatif rendah dengan penyerapan sebesar 97,65% dari jumlah target 100%. Adapun penyerapan yang paling tinggi terdapat pada kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan persentase 99,34% dikarenakan kegiatan ini sudah rutin dilakukan setiap bulannya dan hanya ada sedikit sisa dari anggaran awal. Sedangkan penyerapan yang paling rendah terdapat pada kegiatan anggaran Penguatan Helpdesk dan Lounge dengan persentase masih 69,83% dikarenakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di Bandara Husein Sastranegara Bandung tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan sudah tidak terdapat pos pelayanan pemulangan PMI sehingga pelayanan pemulangan dilaksanakan di Kantor UPT BP2MI Bandung.

**Tabel 19**  
**Realisasi Keuangan UPT BP2MI Bandung Tahun 2021**

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2021				
<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	:	<b>BP2MI</b>		
<b>UNIT KERJA</b>	:	<b>UPT BP2MI BANDUNG</b>		
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	:	<b>2021</b>		

KEGIATAN/KOMPONEN	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA
Layanan Dukungan Manajemen Satker				
1. Layanan Tata Usaha Satker	1.274.753.000	1.164.599.695	91,36	110.153.305
Prasarana Perkantoran				
1. Pengadaan Prasarana Kantor	67.500.000	66.892.963	99,10	607.037
Pelayanan penempatan PMI Non Pemerintah				
1. Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP)	465.530.000	448.560.140	96,35	16.969.860
2. Penempatan PMI non Pemerintah				
2. Fasilitasi layanan pemerintah PMI non pemerintah	1.793.025.000	1.755.748.604	97,92	37.276.396
Pelayanan Pelindungan terhadap PMI				
1. Penanganan PMI Bermasalah, Sakit dan Meninggal	352.860.000	317.667.572	90,03	35.192.428
2. Pelayanan Pengaduan, Mediasi dan Advokasi	72.030.000	69.248.761	96,14	2.781.239
3. Perlindungan CPMI/PMI	95.686.000	78.172.012	81,70	17.513.988
4. PMI Non Prosedural yang difasilitasi dokumen penempatannya	95.686.000	78.172.012	81,70	17.513.988
4. Penguatan Helpdesk dan Lounge	22.160.000	15.473.995	69,83	6.686.005
Pemberdayaan PMI Puma dan keluarganya				
1. Pemberdayaan PMI Puma dan keluarganya	435.720.000	429.558.361	98,59	6.161.639
Operasional Perkantoran UPT Daerah				
1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.039.796.000	4.013.289.397	99,34	26.506.603
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.658.796.000	4.606.710.739	98,88	52.085.261

**Tabel 20**  
**Realisasi Keuangan UPT BP2MI Bandung Per Jenis Belanja Tahun 2021**

REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN TAHUN 2021 PER JENIS BELANJA				
MATA ANGGARAN	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	13.227.856.000	12.961.160.261	97,61	316.695.739
A. Belanja Pegawai	4.039.796.000	4.008.527.419	99,23	31.268.581
B. Belanja Barang/Jasa	9.170.560.000	8.885.739.879	96,89	284.820.121
C. Belanja Modal	67.500.000	66.892.963	99,10	607.037

Tabel 21  
Realisasi Keuangan UPT BP2MI Bandung berdasarkan Belanja Tahun 2021

**REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN TAHUN 2021  
PER BELANJA**

KODE	MATA ANGGARAN	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA
<b>51</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.039.796.000</b>	<b>4.013.289.397</b>	<b>99,34</b>	<b>26.506.603</b>
5111	Belanja Geji dan Tunjangan PNS	2.515.801.000	2.507.618.965	99,67	8.182.035
5122	Belanja Lembur	61.500.000	48.500.000	78,86	13.000.000
5124	Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	1.462.495.000	1.457.170.432	99,64	5.324.568
<b>52</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>9.170.560.000</b>	<b>8.885.739.879</b>	<b>96,89</b>	<b>284.820.121</b>
5211	Belanja Barang Operasional	2.930.782.000	2.865.713.832	97,78	65.068.168
5212	Belanja Barang Non Operasional	1.468.207.000	1.373.457.568	93,55	94.749.432
5218	Belanja Barang Persediaan	147.440.000	147.162.850	99,81	277.150
5221	Belanja Jasa	2.077.905.000	2.030.183.791	97,70	47.721.209
5231	Belanja Pemeliharaan	400.387.000	391.095.170	97,68	9.291.830
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.145.839.000	2.078.126.668	96,84	67.712.332
<b>53</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>67.500.000</b>	<b>66.892.963</b>	<b>99,10</b>	<b>607.037</b>
5321	Belanja Modal Peralatan dan Bahan	67.500.000	66.892.963	99,10	607.037

## E. KENDALA

### 1. Seksi Penyiapan dan Penempatan

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Penyiapan dan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan diberlakukannya sistem Finger Print pada Penerbitan E-KTKLN (tidak ada fisik berupa Kartu) masih banyak PMI/CPMI yang mempertanyakan bukti bahwa E-KTKLN telah selesai diproses.

### 2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat kesulitan dalam menangani kasus mencari alamat PMI / memberikan info ke Keluarga PMI tentang permasalahan PMI dikarenakan tidak ada anggaran.
- 2) Pemanggilan P3MI untuk mediasi sangat sulit dikarenakan P3MI apabila dipanggil jarang yang datang bahkan banyak P3MI yang tutup.

- 3) *Counter* Bandara di Husein Sastranegara sudah tidak ada sehingga mengakibatkan pendataan keberangkatan dan kepulangan PMI tidak maksimal.
- 4) Edukasi kewirausahaan harus melibatkan mantan PMI Korea yang agak sulit untuk mendapatkannya dan kebanyakan sudah memiliki usaha sendiri.

### **3. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat banyak yang belum mengetahui terkait prosedur Penempatan Kerja ke Luar Negeri.
- 2) Masyarakat pencari kerja banyak yang belum mengetahui terkait adanya website jobsinfo ([jobsinfo.bnp2tki.go.id](http://jobsinfo.bnp2tki.go.id)) dan cara menggunakannya.

### **4. Sub Bagian Tata Usaha**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Masuknya Laporan dari setiap Seksi dan Satuan Kerja daerah masih sering terlambat.

## **F. TINDAK LANJUT**

### **1. Seksi Penyiapan dan Penempatan**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Penyiapan dan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Petugas memberikan penjelasan kembali mengenai kebijakan tentang perubahan KTKLN menjadi E-KTKLN.

### **2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan Disnakertrans / P4TKI / LTSP walaupun info yang didapat agak terlambat.
- 2) Membuat surat ke Kedutaan walaupun jarang ada balasan.

- 3) Sudah menemui pihak-pihak yang berkepentingan dan juga untuk sementara Petugas Pendataan menunggu di depan pintu keluar.
- 4) Mencari informasi ke para mantan PMI Korea untuk mendapatkan data PMI Korea yang belum memiliki usaha sendiri.

### **3. Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman di beberapa lokasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- 2) Menjelaskan prosedur mendaftar melalui website [jobsinfo.bnp2tki.go.id](http://jobsinfo.bnp2tki.go.id) kepada pencari kerja.

### **4. Sub Bagian Tata Usaha**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan setiap seksi-seksi untuk mengatasi permasalahan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan.

## BAB IV – PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. UPT BP2MI Bandung merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi semua pihak terutama masyarakat Propinsi Jawa Barat dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BP2MI Bandung berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, Program Kerja, Penetapan Kinerja antara Kepala BP2MI dengan Kepala UPT BP2MI Bandung maupun Rencana Strategis (Renstra) UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024;
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT BP2MI Bandung Tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh UPT BP2MI Bandung pada tahun anggaran 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Pelayanan Teknis di UPT BP2MI Bandung secara umum sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Pelayanan Penempatan mulai dibuka kembali pada bulan Juni tahun 2020 secara terbatas sehingga jumlah Pelayanan Penempatan masih rendah.
  - b. Hampir serupa dengan kondisi pelayanan penempatan yang diberhentikan sementara waktu, tidak semua jenis pelayanan perlindungan diberhentikan ada beberapa pelayanan kasus PMI Bermasalah yang masih dilakukan tetapi hanya sebatas penerimaan pelayanan kasus PMI Bermasalah melalui surat secara online. Hal ini menyebabkan persentase jumlah pelayanan perlindungan pun belum maksimal.
  - c. Menurunnya jumlah target dan capaian peta potensi PMI di Jawa Barat karena kurangnya informasi lowongan pekerjaan yang menarik minat CPMI. Selain itu sama halnya dengan pelayanan teknis lainnya, pelayanan jobs info pun masih belum maksimal karena pelaksanaan Sistem kerja *Work From Home (WFH)*



dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga para pencari informasi lowongan pekerjaan tidak bisa mendapatkan informasinya secara langsung hanya bisa melalui internet.

- d. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dengan terintegrasinya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK). Berbeda dengan pelayanan teknis lainnya, pengelolaan data di Sub Bagian Tata Usaha masih terus dikerjakan walaupun dilakukan di rumah masing-masing pegawainya.

## B. SARAN

1. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi;
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan UPT BP2MI Bandung akan ditingkatkan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pusat dan daerah.



## LAMPIRAN



**TABEL**  
**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN**

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	32.000 orang	8.000 orang	1.310 orang	8.000 orang	1.424 orang	8.000 orang	648 orang	8.000 orang	1.340 orang	
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	18,03%	4,51%	15,75%	4,51%	14,19%	4,51%	23,35%	4,51%	43,57%	
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dikegah	50 orang	-	-	-	-	-	25 orang	9 orang	25 orang	28 orang
	Fasilitasi penulisan Pekerja Migran Indonesia	105 orang	25 orang	62 orang	25 orang	23 orang	27 orang	55 orang	27 orang	70 orang	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	140 orang	-	-	40 orang	40 orang	60 orang	60 orang	60 orang	40 orang	40 orang
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	95	95	-	95	-	95	72,01	95	88,99	
	Nilai IKPA	84	84	-	84	-	84	78,03	84	97,79	
	Nilai Zona Integritas	90	90	-	90	-	90	88,03	90	88,03	



**TABEL**  
**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 BERDASARKAN REALISASI TRIWULAN**

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2021				Capaian (%)
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	32.000 orang	1.310 orang	1.424 orang	648 orang	1.340 orang	14,76
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	18,03%	15,75%	14,19%	23,35%	43,7%	416,58
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil diagah	50 orang	52 orang	5 orang	9 orang	28 orang	188
	Fasilitas pemulangan Pekerja Migran Indonesia	105 orang	62 orang	23 orang	55 orang	70 orang	200
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	140 orang	-	40 orang	60 orang	40 orang	100
	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	95	-	-	72,01	88,99	93,67
	Nilai DKPA	84	-	-	76,63	97,79	116,42
Nilai Zona Integritas	90	-	-	85,03	85,03	97,81	